

ANALISIS PENETAPAN HARGA KAYU JATI PLUS PERHUTANI BERDASARKAN *STUMPAGE COST* DAN *WILLINGNESS TO PAY*

Arga Pramudita^{1*}, Suryanaji²

¹ Kelompok Peneliti Industri dan Pemasaran, Puslitbang Perhutani

² Biro Perencanaan dan Pengembangan Bisnis, Divisi Regional Jawa Tengah
Puslitbang Perhutani, Jl. Wonosari, Batokan, Cepu, 58302

* Email: argapram@gmail.com

RINGKASAN

Jati Plus Perhutani (JPP) sebagai salah satu hasil program pemuliaan pohon memiliki beberapa keunggulan komparatif dibandingkan dengan jenis jati yang dikembangkan melalui perbanyakan konvensional dengan biji. Keunggulan dalam hal keliling batang dan produktivitas yang tinggi dalam jangka waktu yang relatif singkat akan memberikan biaya pembangunan tegakan yang minimal sehingga harga juga tidak terlalu tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui harga pokok produksi kayu JPP hasil penjarangan melalui pendekatan biaya selama daur dan pendekatan pasar (*market value*). Metode yang digunakan adalah pendekatan nilai tegakan (*stumpage cost*) dan metode *Willingness to Pay* (WTP) yang terdiri dari survei pelanggan dengan kuisioner dan *in depth interview* dengan sistematik *random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan nilai pembangunan tegakan JPP selama 9 tahun sebesar Rp. 20.024.309,-/ha, dengan harga pokok penjualan sortimen AI sebesar Rp. 642.538,- dan sortimen AII sebesar Rp. 881.214,-. Sedangkan berdasarkan pendekatan pasar, konsumen menginginkan harga kayu JPP tidak jauh berbeda dengan kayu jati asal hutan rakyat atau penurunan harga sebesar 13% - 22%. Rekomendasi kebijakan yang disarankan terhadap penentuan harga kayu JPP adalah perlu pemisahan dan pembedaan harga jual dasar kayu JPP supaya dapat bersaing dengan harga kayu rakyat dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan perusahaan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kata Kunci: Harga Pokok Produksi, Jati, Konsumen, *Market Value*, Perhutani.

PERNYATAAN KUNCI

- Jati Plus Perhutani sebagai produk hasil penelitian dan pengembangan Puslitbang Perhutani dan sudah ditanam secara operasional mulai tahun 2007 sampai dengan tahun

2017 seluas ± 200.000 ha. Potensi kayu penjarangan dari luasan tanaman JPP dalam kondisi baik, dengan asumsi hasil penjarangan sebesar 4 m³/ha, dapat mencapai ± 170.000 m³.

- Harga Jual Dasar (HJD) merupakan besaran harga yang ditetapkan oleh Direksi Perum Perhutani untuk kepentingan penjualan kontrak dan penjualan langsung secara retail. Harga ini tertera dalam saluran penjualan di Penjualan *Online* Toko Perhutani yang merupakan *e-commerce* Perum Perhutani dengan akses melalui tokopedia.com.
- Kebijakan harga jual dasar kayu JPP masih disamakan dengan harga jual kayu jati konvensional sehingga konsumen kayu jati cenderung lebih memilih kayu jati konvensional, sehingga kayu JPP dianggap sebagai produk *slow moving* karena kurang diminati pasar.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Perlu dilakukan penetapan harga khusus terhadap kayu JPP, dengan membedakan terhadap kayu jati konvensional yang ada di Tempat Pengumpulan Kayu.
- Dalam hal perencanaan dan penataan wilayah hutan, perlu dibuat *cluster* kayu JPP yang ditujukan untuk produksi kayu khusus sortimen AI dan AII untuk memenuhi kebutuhan kayu di sentra industri kecil dan menengah.

I. PENDAHULUAN

Sifat kayu jati yang banyak diminati masyarakat sebagai bahan baku bangunan

dan *furniture* menyebabkan permintaan kayu jati semakin meningkat. Seiring dengan permintaan yang semakin meningkat maka otomatis nilai ekonomi kayu jati juga semakin tinggi. Perum Perhutani yang sampai dengan saat ini masih mengelola hutan jati di Pulau Jawa mempunyai peluang untuk meningkatkan produktivitas hutan jatinya yaitu dengan mengembangkan klon unggul yaitu Jati Plus Perhutani (JPP).

Jati Plus Perhutani sebagai produk hasil pemuliaan pohon yang dilakukan oleh Puslitbang Perum Perhutani, memiliki keunggulan di antaranya pertumbuhan tegakan lebih cepat, seragam dan kayu yang berkualitas. Dengan keunggulan tanaman JPP ini maka diharapkan dengan penerapan umur tebang yang lebih awal dan lebih cepat bila dibandingkan umur tebang pada jati konvensional tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan faktor ekologis tanaman.

Penentuan harga kayu jati saat ini masih dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan belum mencerminkan harga pokok produksinya. Dari hal tersebut maka perlu kiranya mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi kayu JPP dari kegiatan pengelolaan awal hingga pemasaran kayunya sampai dengan umur tertentu. Harga Pokok Produksi kayu JPP ini bisa berbeda-beda antara KPH satu dengan yang lain tergantung karakteristik wilayah dan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sesuai seperti yang dijelaskan oleh Davis

(1954 dan 1987) dalam Andayani (1998) bahwa nilai tegakan (*stumpage*) di masing-masing lokasi produsen sebenarnya berbeda (situasional) sehingga tidak dapat ditetapkan secara sama (satu harga). Perbedaan tersebut antara lain terletak pada beberapa parameter dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tegakan yaitu daur ekonomi, keadaan hutan, geografis hutan dan komponen biaya pembentukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui harga pokok produksi kayu JPP hasil penjarangan melalui pendekatan biaya selama daur dan pendekatan pasar (*market value*).

II. SITUASI TERKINI

Jati Plus Perhutani mulai dikembangkan secara luas adalah JPP PHT 1 dan PHT 2 mulai tahun 2007. Sampai dengan tahun 2017, sudah ditanam seluas \pm 200.000 ha, di seluruh wilayah Perum Perhutani, sedangkan yang dikelola oleh Puslitbang seluas 446,7 ha. Jati Plus Perhutani klon PHT 1 dan PHT 2 juga telah mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman dari Kementerian Pertanian tahun 2009. Uji coba penebangan penjarangan Jati Plus Perhutani dilakukan pada tahun 2013, di petak 61a, RPH Kedunggal, BKPH Kedunggal, KPH Ngawi dan menghasilkan ume kayu sebesar 150,5 m³/ha, jumlah pohon rata-rata 597 pohon/ha dengan diameter rata-rata 23,1 cm (Wibowo, 2013). Hasil uji coba

penjarangan pada petak lain, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil penjarangan perhutanan klon JPP tahun 2017

No	Lokasi	Realisasi (m ³)	Produktivitas (m ³)	Keterangan
1.	KPH Ngawi	143,49	30,53	Tahun tanam 2004
2.	KPH Tuban	134,17	11,37	
3.	KPH Cepu	214,12	25,49	

Kayu hasil penjarangan di atas di dominasi oleh sortimen AI, kelas diameter 16 – 19 cm, mutu T, panjang 2 meter *up*. Harga rata-rata berdasarkan harga jual dasar yang ditetapkan oleh Perum Perhutani tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.225.000,- untuk sortimen AI dan Rp. 2.100.000,- untuk sortimen AII (mutu T, kelas diameter 16 – 19 cm dan 24 – 26 cm, panjang 2,00 – 2,90 meter).

III. METODOLOGI

Penelitian dilakukan tahun 2017, di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi, Divisi Regional Jawa Timur. Harga Pokok Produksi ditentukan dengan melalui pendekatan nilai tegakan (*stumpage value*) dalam Rp/ha. Mekanisme analisis menggunakan metode perhitungan biaya tetap yang dikeluarkan selama daur. Data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan unit kerja pendukung yaitu Kantor Pusat, Kantor Divisi Regional, Kantor Puslitbang, Kantor Pusdikbang, Kantor Biro Perencanaan, dan Kantor KBM Penjualan.

Seluruh biaya pembentukan tegakan JPP dibawa ke satuan hektar (Rp/ha) dan dihitung dengan biaya yang dikeluarkan selama daur tanaman JPP yang sudah dilakukan penebangan yaitu umur 9 tahun. Kaitannya dengan konsep *joint cost*, besarnya biaya yang dialokasikan untuk JPP dihitung dengan pendekatan luas penggunaan lahan untuk tanaman jati. Selanjutnya Untuk mendapatkan nilai harga pokok produksi kayu bundar tiap sortimen, hasil penghitungan biaya tegakan sebelum ditebang ditambah dengan biaya eksploitasi, biaya pemasaran (Rp/m³) dan Provisi Sumber Daya Hutan tiap sortimen (Anonim, 2009).

Data primer yang digunakan untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap harga kayu JPP diperoleh dari hasil wawancara terhadap pembeli yang melakukan pembelian kayu JPP di wilayah KBM penjualan Madiun sebanyak 30 responden. Pengambilan sampel responden dilakukan dengan sistematis *random sampling* dengan pembagian tipe pembeli berdasarkan jenis pembeli perorangan, perusahaan dan *trader/agen*.

IV. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI

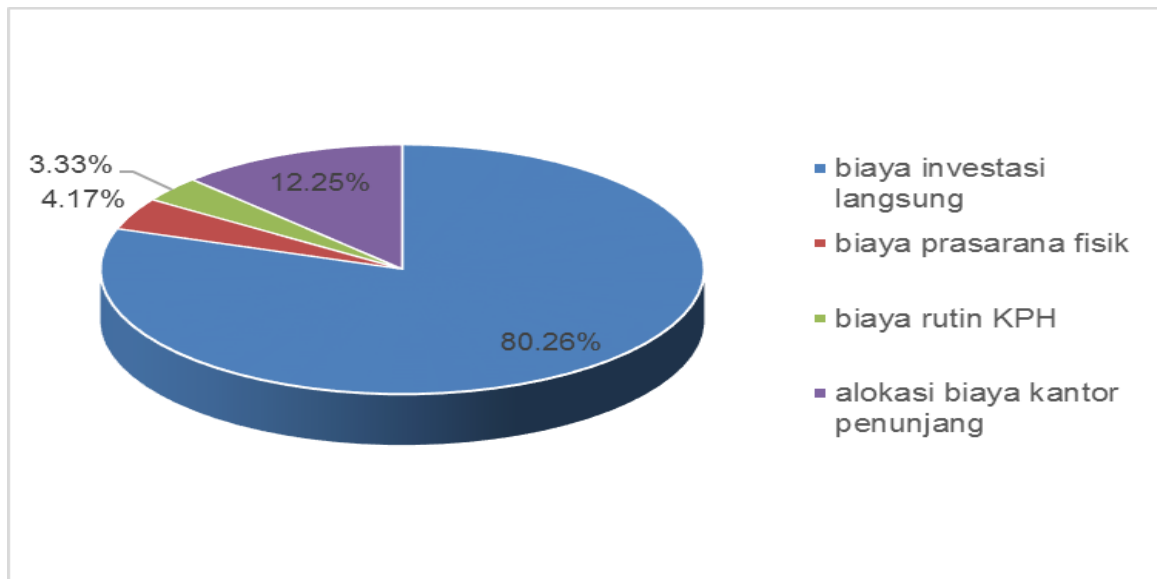
Komponen biaya pembangunan suatu hutan tanaman industri secara garis besar meliputi kegiatan perencanaan, penanaman, penebangan kayu atau pemungutan, pemeliharaan hutan,

pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Perhitungan untuk mengetahui biaya pembangunan tegakan dilakukan dengan analisis finansial menggunakan *compounding factor* yang disusun dalam bentuk *cashflow* selama daur dikaitkan dengan premi produksi kayu yang dihasilkan saat pemanenan hasil hutan.

Analisis finansial dilakukan dengan menghimpun biaya per masing-masing kegiatan yang dikeluarkan, berdasarkan pada laporan keuangan di KPH Ngawi. Biaya yang dikeluarkan dibagi dalam 3 kategori yaitu biaya investasi langsung, biaya prasarana fisik dan biaya rutin. Biaya investasi langsung terdiri dari biaya perencanaan keluar setiap 10 tahun sekali, biaya persemaian dan biaya tanaman, keluar 1 kali selama daur, biaya pemeliharaan, keluar mulai tahun pertama sampai tahun ke empat, dan biaya perlindungan yang dikeluarkan setiap tahun sampai dengan umur tebang.

Biaya prasarana fisik terdiri atas biaya pemeliharaan dan penyusutan sarana prasarana yaitu kendaraan, tanah dan bangunan, peralatan kantor dan bengkel instalasi. Biaya rutin terdiri atas biaya yang dikeluarkan secara rutin setiap tahun sampai dengan waktu tebang, yang terdiri atas biaya pajak, biaya umum dan administrasi, biaya gaji, premi produksi dan biaya pendidikan dan penyuluhan.

Biaya prasarana fisik dan biaya rutin merupakan biaya bersama atau *joint cost*. *Joint cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk



Gambar 1. Persentase biaya produksi kayu JPP di KPH Ngawi

menghasilkan dua macam produk atau lebih yang berlainan. Dalam perhitungan beban biaya untuk tanaman JPP di KPH Ngawi, perhitungan *joint cost* didasarkan pada kontribusi luas tanaman JPP di KPH Ngawi terhadap luas hutan produksi di KPH Ngawi.

Biaya produksi kayu JPP juga merupakan bagian dari biaya prasarana fisik dan rutin yang dikeluarkan oleh unit kerja yang mendukung kegiatan pengelolaan sumber daya hutan di KPH yaitu Kantor Pusat, Puslitbang, Puskidbang, Divisi Regional Jawa Timur, biro perencanaan dan divisi komersial kayu. Biaya unit kerja pendukung ini juga merupakan *joint cost* dengan komoditi lainnya. Pembebanan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing

unit kerja dihitung berdasarkan kontribusi luas tanaman JPP dibandingkan dengan luas hutan produksi jati di masing-masing unit kerja.

Bila dilihat besarnya komponen-komponen penyusun biaya produksi kayu JPP, biaya paling tinggi yaitu di komponen biaya investasi langsung yang terdiri dari biaya penyusunan RPKH, biaya persemaian, biaya tanaman, biaya pemeliharaan dan biaya perlindungan. Untuk lebih jelasnya dalam Gambar 1.

Distribusi biaya pembangunan tegakan JPP dimana komposisi biaya investasi langsung yang berkaitan erat dengan kegiatan pengelolaan tanaman JPP sudah cukup baik, karena hampir sebagian besar biaya digunakan untuk tanaman JPP.

Jumlah biaya rutin, prasarana fisik dan biaya unit kerja penunjang yang lebih kecil daripada biaya investasi langsung juga

disebabkan karena dalam tebangan JPP ini dilakukan pada umur 9 tahun.

Tabel 2. Perhitungan HPP Kayu JPP KPH Ngawi Tahun 2017

Biaya selama daur	Umur tebang	HPP		
		AI	AII	AIII
20.024.309	9 tahun			
Harga Pokok Produksi di tegakan		123.987	272.928	-
Biaya eksploitasi		250.000	250.000	-
Biaya pemasaran		59.043	59.043	-
PSDH		72.000	114.000	-
Biaya pengujian		9.000	9.000	-
Sharing PHBM (25%)		128.508	176.243	-
Jumlah		642.538	881.214	-

Biaya pembangunan tegakan yang terbentuk untuk tegakan tanaman JPP umur 9 tahun adalah Rp. 20.024.309,-/ha. Untuk mengetahui biaya produksi maka biaya pembangunan tegakan ini dibagi dengan realisasi produksi kayu JPP yang dihasilkan. Perincian perhitungan ditunjukkan pada Tabel 2.

Harga Pokok Produksi Kayu JPP di KPH Ngawi hasil tebangan petak 61a, berdasarkan perhitungan diperoleh biaya produksi kayu AI sebesar Rp. 642.538,- dan sortimen AII sebesar Rp. 881.214,-. Nilai ini merupakan harga dimana masih merupakan titik impas, sehingga belum ada keuntungan, sehingga perlu ditambah dengan *profit margin* yang diinginkan.

Hasil survei responden di wilayah penjualan Jawa Timur, menunjukkan hasil bahwa konsumen kayu menginginkan penurunan harga terhadap kayu JPP agar minimal tidak berbeda jauh dengan kayu

rakyat. Hal ini karena anggapan konsumen bahwa kayu jati JPP secara mutu hampir sama dengan kayu rakyat.

Tabel 3. Prosentase penurunan harga kayu JPP di wilayah KBM Jawa Timur

Unit kerja	Prosentase Penurunan Harga Berdasarkan Keinginan Konsumen		
	AI (%)	AII (%)	AIII (%)
Jawa Timur	15,5 ± 2,34	20,6 ± 2,74	-

Dari hasil ini maka dapat memberikan gambaran bahwa harga kayu JPP masih perlu dikaji untuk diturunkan sampai dengan batas tertentu di mana pengusaha/konsumen masih mampu mendapat membeli dengan perbandingan asal kayu rakyat. Standar deviasi yang masih relatif kecil disebabkan karena variasi responden tidak terlalu besar, hanya dikerucutkan kepada pembeli kayu JPP yang merupakan segmen pembeli menengah sampai dengan kecil. Untuk mengetahui harga beli maksimum yang masih bisa diterima oleh

pembeli secara riil maka nilai persentase kenaikan harga tersebut dikalikan dengan harga jual dasar pada setiap kelas diameter, kelas panjang dan kelas mutu yang ditetapkan.

REFERENSI

- Andayani, W. 1998. Sistem Distribusi dan Penetapan Harga Kayu Bulat Jati di Jawa. Disertasi S3 Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Anonim. 2009. Analisis Finansial Penerapan Harga Pokok Produksi Kayu Bundar Jati Perhutani. Laporan Penelitian. Puslitbang Perum Perhutani Cepu. Cepu.
- Asri, M. 1991. Marketing. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. Yogyakarta.
- Priyanto, R. 2004. Analisis Distribusi Kayu Jati Rakyat di Kabupaten Gunungkidul. Skripsi S1. Fakultas Kehutanan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Sofyan, P., Warsito. 1995. Penaksiran Biaya dan Pendapatan Pengusahaan Hutan Tanaman. Bahan Kuliah Analisis Bisnis Pengusahaan Hutan Program Pasca Sarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Wibowo, A. 2013. Uji Coba Tebangan Kayu JPP Asal Stek Pucuk (Studi kasus petak 61a, BKPH Kedunggalar, KPH Ngawi). Laporan Pengamatan. Cepu. Cepu.